

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan padat. Di dunia, Indonesia berada pada posisi keempat dengan laju pertumbuhan tertinggi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 237,6 juta jiwa dengan wwlaju pertumbuhan 1,49. Hal ini berarti setiap tahunnya terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 3,5 juta setiap tahunnya. Jika laju pertumbuhan tidak ditekankan maka diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa (BKKBN,2007). Hal ini menunjukkan satu dari dua puluh penduduk dunia adalah penduduk Indonesia.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diatur serta dibatasi, akan berdampak negatif terhadap bidang kehidupan bidang sosial, ekonomi, maupun politik, yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan pembangunan nasional. Permasalahan kependudukan yang dihadapi Indonesia melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Upaya pemerintah untuk mengatasi ledakan penduduk ini, yaitu dengan suatu program yang dikenal dengan istilah Gerakan Keluarga Berencana. Untuk menjalankan tugas ini pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mempunyai visi sesuai dengan Undang – Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu : terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan persebaran penduduk dengan

lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, tetapi juga dengan kondisi perkembangan sosial budaya masyarakat dengan motto “Dua anak cukup, laki – laki dan perempuan sama saja”

Gerakan Keluarga Berencana nasional (GKBN) telah berjalan kurang lebih 40 tahun tidak sepenuhnya berhasil dalam menuntaskan masalah kependudukan, hal ini diperlihatkan pertambahan penduduk Indonesia selama periode 2005-2014 berjumlah 29.232.215 jiwa atau pertumbuhan penduduk sebesar 1,56% periode 2005-2014. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni agama, umur, pendidikan, pekerjaan, budaya, akses pelayanan KB (keterjangkauan fisik, keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, keterjangkauan pengetahuan, keterjangkauan admistrasi) dan kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan interpersonal, mekanisme pelayanan dan ketepatan Konstelasi pelayanan akseptor) (BKKBN, 2014) .

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki penduduk berjumlah 12.453.594 jiwa pada tahun 2005, dan pada tahun 2014 jumlahnya 13.530.911 jiwa, terkait hal tersebut maka selama sepuluh tahun terakhir penduduk Sumatera Utara bertambah sebesar 1.077.317 jiwa atau pertumbuhan penduduk sebesar 1,29% pada periode 2005-2014. Hal ini menyebabkan Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah (BPS, 2014). Hal ini merupakan modal pembangunan jika dilihat dari kuantitas namun pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat mengurangi output yang akan dihasilkan oleh setiap penduduk, sehingga menekan

berbagai tingkat kehidupan yang mengakibatkan perjuangan hidup terasa sangat sulit. (Budiarto, 1986).

Kabupaten Samosir adalah bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 9 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Pangururan yang terdiri dari 28 Desa. Desa Parlondut merupakan salah satu desa di Kecamatan ini yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Menurut data yang diperoleh dari PPKBD pada tahun 2014, penduduk di Desa ini berjumlah 4128 orang atau 945 KK di antaranya terdapat 624 PUS dengan peserta KB aktif 429 KK serta banyak usia PUS memiliki anak lebih dari dua orang (PPKBD, 2014). Keadaan ini dimungkinkan oleh faktor umur, pendidikan, pekerjaan, budaya, akses pelayanan (keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, keterjangkauan pengetahuan, keterjangkauan administrasi) dan kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan interpersonal, mekanisme pelayanan dan ketepatan Konstelasi pelayanan akseptor). Sehubungan dengan ini perlu dikaji keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka identifikasi masalahnya adalah mencakup faktor umur, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, akses pelayanan KB (keterjangkaun fisik, ekonomi, pengetahuan, administrasi) dan kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan interpersonal, mekanisme pelayanan dan ketepatan Konstelasi pelayanan akseptor) di desa Parlondut Kecamatan Pangururan.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka masalahnya dibatasi pada keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut meliputi faktor umur, pendidikan, pekerjaan, budaya, akses pelayanan KB (keterjangkaun fisik, ekonomi, pengetahuan, administrasi) dan kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan interpersonal, mekanisme pelayanan dan ketepatan Konstelasi pelayanan akseptor) di desa Parlondut Kecamatan Pangururan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka masalahnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor umur?
2. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor pendidikan?
3. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor pekerjaan?
4. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor budaya?
5. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan

interpersonal, mekanisme pelayanan dan ketepatan Konstelasi pelayanan akseptor) ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui antara lain :

1. Keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor umur.
2. Keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor pendidikan.
3. Keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor pekerjaan.
4. Keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor budaya.
5. Keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Parlondut ditinjau dari faktor kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan interpersonal, mekanisme pelayanan dan ketepatan Konstelasi pelayanan akseptor)

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan Kabupaten Samosir dalam merumuskan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk melalui gerakan KB di Kabupaten pada umumnya, khususnya di Desa Parlondut.
2. Menambah wawasan bagi penulis untuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

3. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain dalam penelitian yang sama pada objek yang berbeda.



THE
Character Building
UNIVERSITY